

**PERILAKU POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA
MANADO KECAMATAN WENANG¹**

Nama : Marlan Karundeng²

ABSTRAK

WNI keturunan tionghoa sering mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah orde baru, dimana mereka tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan politik bahkan suara mereka tidak pernah diperhitungkan sehingga mereka lebih terkonsentrasi pada masalah ekonomi dari pada masalah politik. Setelah dibukanya keran bagi partisipasi politik WNI keturunan Tionghoa menjadikan bentuk partisipasi mereka sangat menarik untuk diamati. Untuk itu penelitian ini akan mencoba melihat perilaku politik warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Manado kecamatan Wenang. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induktif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori dari Mahendra (2005:36) yang mengatakan faktor faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) antara lain : lingkungan sosial politik tak langsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur kepribadian, lingkungan sosial politik langsung berupa situasi.

Dari hasil penelitian perilaku politik warga negara Indonesia keturunan Tionghoa pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Manado kecamatan Wenang. Sangat dipengaruhi oleh faktor identifikasi partai dari kedua pasangan calon serta track record/rekam jejak dari kedua pasangan calon.

Kata kunci : perilaku politik, keturunan Tionghoa

PENDAHULUAN

Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa merupakan kaum Minoritas dan Marginal sehingga keberadaan masyarakat Tionghoa selalu diwarnai berbagai macam peristiwa yang menarik untuk diamati diranah politik di Indonesia dan tiap orde pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini membawa dampak pada sikap dan perilaku elit politik masyarakat Tionghoa dari masa ke masa, baik dari masa Kolonial, Orde lama, Orde baru, sampai pada masa reformasi sekarang ini . Keterlibatan masyarakat Tionghoa di Indonesia di panggung politik bukanlah merupakan hal yang baru, akan tetapi bagaimana hal ini bisa bangkit atau jatuh itu semua tergantung dari kebijakan masing-masing penguasa terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Pada masa **rejim** orde baru, warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sering mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah orde baru, dimana mereka tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan politik, bahkan suara mereka tidak pernah diperhitungkan sehingga mereka lebih terkonsentrasi pada masalah ekonomi dari pada masalah politik. Setelah rejim orde baru runtuh dan diganti dengan dan berubah menjadi reformasi, barulah ada angin segar bagi kaum masyarakat Tionghoa untuk berapresiasi dalam dunia politik, dan ini terbukti dengan munculnya beberapa perundang-undangan yang

¹ Merupakan SKripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

baru untuk mencabut peraturan diskriminatif kepada masyarakat Tionghoa, salah satunya adalah keputusan Presiden No 19 Tahun 2002 tentang ditetapkannya hari tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional, pada Era reformasi masyarakat Tionghoa mulai menyerukan isu-isu lokal tentang penegakan HAM dan juga mulai masuk dan terlibat dalam kehidupan politik Indonesia salah satunya dengan sikap atau perilaku kelompok minoritas masyarakat Tionghoa dalam mengapresiasi perwakilannya sebagai kandidat dalam pemilihan umum.

Bentuk perilaku dan aspirasi yang ditunjukkan masyarakat Tionghoa pada mulanya masih pada taraf ikut berpartisipasi dengan memilih anggota Legislatif dan Eksekutif dalam pemilu dan selanjutnya perilaku mereka lebih berkembang lagi pada saat mereka mencalonkan diri sebagai kandidat dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.

Dalam pemilihan presiden tahun 2014 masyarakat sesuai data yang peneliti peroleh melalui halaman web KPU Manado sebesar 345.652 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan, 87 kelurahan, 940 TPS, pemilih yang menggunakan hak suaranya sebesar 344.370 orang (*sumber: www.manadokota.kpu.go.id/daftarpemilih.php*), dengan demikian ada sebesar 1.282 orang atau 1,002% pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, diantara pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya terdapat pemilih dari keturunan etnis tionghoa, dimana berdomisili di Kecamatan Wenang, seperti yang dikenal oleh masyarakat kota manado, di Kecamatan Wenang banyak bermukim warga Kota Manado yang merupakan warga keturunan Etnis Tionghoa (*sumber: www.beritamanado.com*). Kebanyakan dari mereka tidak begitu antusias dalam kegiatan politik karena di latarbelakangi oleh beberapa alasan antara lain masalah visi dan misi tidak sesuai dengan keinginan mereka, masalah figur yang tidak menguntungkan bagi keberadaan dan kelancaran usaha mereka. Dan mungkin ada alasan yang lain membuat mereka kurang berpartisipasi dalam kegiatan politik. hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti Perilaku Politik Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Di Kota Manado Kecamatan Wenang ?

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini ditekankan pada:

“Bagaimanakah Perilaku Politik Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Manado Kecamatan Wenang?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku politik Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Manado Kecamatan Wenang .

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu politik .

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat keturunan Tionghoa yang berada di Kota Manado .

KERANGKA TEORI

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik (Kristiadi, 2006:28).

Menurut Mahendra (2005: 36) menjelaskan bahwa kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis yaitu :

1. Aktor politik (meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga negara biasa).
2. Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan).
3. Topologi Kepribadian Politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti Otoriter, Machiavelist, dan Demokrat).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) antara lain:

- a). Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.
- b). Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul. Dari lingkungan ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara.
- c). Struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu (yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi).
- d). Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya (Mahendra, 2005:41).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif. Disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul, analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2005:1). dalam pasolong, Harbani metode penelitian administrasi publik.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga pertanyaan yang nantinya akan diajukan, akan lebih terstruktur dan terarah. Dalam melakukan wawancara ini, instrumen yang digunakan adalah alat perekam dan dilengkapi dengan catatan-catatan kecil peneliti. Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana

pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi (Kaelan, 2012:119).

2. Observasi

Data observasi merupakan deskripsi yang aktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, kondisi, ruang beserta maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian (Satori 2009, dalam Kaelan 2012:101).

3. Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan informasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, ceritera, dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, rekaman. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, karya lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti .(Sugiyono, 2008, dalam Kaelan, 2012:126).

Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Patton, 1980, dalam Kaelan (2012:130), yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut kaelan (2012:132), langkah-langkah dalam analisis data penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dilapangan, ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang disajikan akan memudahkan untuk bisa memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan atas penelitian setelah dilakukan verifikasi secara terus-menerus sejak awal memasuki lapangan dan selama proses penelitian berlangsung. Untuk itu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul. Jadi dari data yang diperolehnya sejak semula berupaya mengambil kesimpulan-kesimpulan yang senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Untuk itu mencari pola ,tema, hubungan, persamaan hal-hal yang sering timbul. Jadi dari data yang diperolehnya sejak semula berupaya mengambil kesimpulan. Kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

Dalam negara demokratis, Rakyat adalah subjek dari pada demokrasi itu sendiri, sebagai subjek demokrasi rakyat memainkan peran dan posisi sebagai pelaku demokrasi melalui saluran-saluran yang disediakan baik dalam proses pembuatan kebijakan publik maupun rekrutmen pimpinan politik. Dengan demikian, rakyat didorong untuk memilih

calon pemimpinnya akan tetapi juga memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hak rakyat untuk dipilih dan memilih itu merupakan bagian terpenting dari prinsip demokrasi, Masyarakat yang berada di tingkat daerah, sebagaimana di tingkat pusat, mempunyai kesempatan untuk terlibat langsung dalam politik, terutama dalam hal pemberian hak suara untuk memilih kepala eksekutif. Di samping itu, warga baik secara perseorangan ataupun kelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahannya dalam pembuatan kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka. Partisipasi politik yang luas mengandung di dalamnya kesetaraan politik karena pemerintahan nasional ataupun pejabat yang lebih tinggi biasanya kurang antusias memperhatikan posisi politik dari kalangan masyarakat yang ada di daerah.

Dalam melihat perilaku Politik masyarakat Etnis Tionghoa pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wenang. Untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat, diajukan dua pertanyaan kunci untuk memperoleh keterangan dari informan secara mendetail yakni; pertama dasar pertimbangan apa yang digunakan informan untuk memberikan dukungannya pada salah satu calon. Pertanyaan kedua mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi informan dalam memberikan dukungannya. disamping kedua pertanyaan utama tersebut, diajukan juga beberapa pertanyaan untuk mengontrol dan mengarahkan jawaban responden sehingga diperoleh data yang sifatnya lebih spesifik/detail Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan selama dilapangan, maka ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Wenang dalam Pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain :

- Faktor Lingkungan sosial politik tak langsung
- Faktor Lingkungan sosial politik langsung
- Faktor Struktur kepribadian
- Faktor lingkungan sosial politik

1. Faktor Identifikasi Partai

Konsep identifikasi kepartaian, yang pada khususnya sikap seseorang terhadap isu - isu politik, Calon Presiden atau anggota parlemen masih sangat relevan dengan kehidupan politik Indonesia saat ini khususnya pada saat kampanye pemilu legislatif maupun pemilu presiden, dimana isu-isu politik ditawarkan untuk menjadi pilihan alternatif dalam pemilu. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dominasi isu politik masih dipegang oleh kekuatan sosial politik tertentu.

Mencermati kondisi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di atas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan masih sangat tergantung dari keputusan partai atau kandidat yang berasal dari partai yang dipilih pada saat pemilu. Sehingga keputusan bagi politik untuk menggunakan hak pilihnya merujuk kepada keputusan partai. Gambaran tersebut sangat jelas bila diinterpretasikan dengan data yang diperoleh dilapangan. hampir semua informan yang ditemui mengungkapkan hal yang sama, yakni alasan mereka Politik karena pasangan tersebut berasal atau direkomendasikan oleh partai PDIP.

➤ **Wawancara dengan S.J.Y** (ketua komunitas budaya tionghoa di Sulut)

“saya memilih pasangan Jokowi-Jk, dari PDI-P karena Megawati membuat KEPPRES RI no.19 tahun 2002 hari libur fakultatif untuk IMLEK ketika menjabat sebagai Presiden. Hal ini yang menjadi landasan bagi masyarakat etnis tionghoa Kecamatan Wenang untuk memilih pasangan yang diusung oleh PDIP.”

Bahkan sampai pada tingkatan doktrin yang tertanam dalam hati masyarakat, yang mana ukuran kelayakan hidup mereka diakui setelah dikeluarkannya KEPPRES tentang imlek.

Selain dari hal tersebut ada temuan dilapangan bahwa ketertarikan mereka terhadap partai PDIP karena semboyan partai yang peduli dengan masyarakat kelas bawah alias *wong cilik*. Atas pertimbangan tersebut maka pilihan-pilihan politik masyarakat masih melihat dari partai mana yang mengusung dan dari figur kandidat siapa yang bertarung.

2. Faktor Kandidat

Fenomena perilaku politik dalam skope Indonesia lebih memperhitungkan figur ketimbang program, ideologi, identifikasi dengan partai politik atau faktor lain. Pesona figur ini sebagaimana menjelaskan kejutan partai PDIP yang mengusung Jokowi-JK menjadi magnet yang menyedot kartu suara politik. Secara empirik, orientasi politik terhadap figur kandidat sangat besar ketimbang orientasi politik terhadap partai-partai tertentu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan orientasi antara keduanya seakan-akan ada kolaborasi atau saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Gambaran tersebut dapat disimak melalui berbagai macam pemilihan yang dilaksanakan di negara ini, baik pemilihan umum, pemilihan presiden sampai pada level pemilihan gubernur, dan walikota. Dimana sebagian besar pemilih lebih mengutamakan figur atau kandidat yang mereka kenal ketimbang dilihat dari latar belakang partai politik yang mengusung kandidat tersebut.

➤ Wawancara dengan C,TJ (39thn)

“Faktor figur sangat berpengaruh pada saat saya menjatuhkan pilihan politik, sekarang melihat figur yang benar-benar peduli dan komitmen dengan aspirasi masyarakat. Alasan Politik pasangan Jokowi – JK, karena figur dari seorang Jokowi yang merakyat, blusukan, sederhana. Saya tidak suka dengan figur dari Prabowo yang Arogan, kaku, dan dilihat dari latar belakang dari seorang Prabowo yang dari Militer.”

Kecenderungan atas figuritas kandidat tersebut seiring dengan perubahan dalam pola pemilihan umum yang pada tahun sebelumnya masyarakat hanya pemilih partai dan partai yang menentukan siapa-siapa yang duduk dalam parlemen maupun dalam jabatan-jabatan politik lainnya. Perubahan pola pemilihan tersebut maka, masyarakat/pemilih kemudian dapat menggunakan hak otonomnya dalam memberikan hak suara sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa pemilihan simbolitas seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu pada level seperti ini, masyarakat/pemilih kemudian memberikan hak pilihnya sesuai dengan pilihan sendiri dengan rujukan pada figur atau kandidat yang mereka kenal dalam kehidupan keseharian mereka. Dimana figur atau kandidat yang sangat dekat dengan mereka itulah yang akan dipilih sebagai representasi dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dari variabel figur kandidat ini paling tidak ada dua hal yang menjadi daya tarik politik, yaitu *performance* (penampilan), *track record* (Rekam Jejak), dan pengalaman. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dipaparkan secara ringkas mengenai pengaruh figuritas dari kandidat calon terhadap perilaku Politik masyarakat etnis tionghoa Kecamatan Wenang yang ditinjau dari segi *performance* (penampilan), *track record* (Rekam Jejak), dan pengalaman yang mempengaruhi perilaku Politik masyarakat pada pemilihan umum .

3. Performance (Penampilan)

Penampilan masuk dalam satu paket yang dikenal dengan ‘pencitraan’ diri. Disamping menjual program, seorang kandidat juga harus pintar menjual citra. Pencitraan sangat penting, sebab ditengah kondisi riil yang ada dalam masyarakat yang semakin materealistis, banyak politik dan rakyat menginginkan calon pemimpinnya punya kultur, santun, agamis, jujur dan bertanggung jawab. Citra pribadi calon berkaitan dengan sejauh mana mereka mampu memperlihatkan penampilan yang paling prima kepada massa pendukungnya. Dalam membangun citra pasangan calon akan menghadapi isu seputar kredibilitas, masa lalu, politik dan pribadi. Sesungguhnya *performance* atau penampilan seorang kandidat di ukur dari bagaimana penilaian dari pihak luar atau orang lain terhadap sang kandidat.

Dalam konteks Pemilu Presiden, kita dapat diperhadapkan dengan persoalan yang sama, dimana Pilihan politik masyarakat pada saat pemilu sangat berpengaruh dengan faktor kandidat. Sebagai gambaran umum, kadangkala pemilih lebih berorientasi kepada kandidat ketimbang partai yang mengusung kandidat tersebut.

➤ **Wawancara dengan F.E.B (38thn)**

“Lebih memilih pasangan Jokowi-JK, yang memiliki penampilan sederhana dan juga diikuti karena visi dan misi yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, sehingga para pedagang menuju ke level yang lebih baik. (memilih karena visi dan misi)”.

Performance dari seorang kandidat juga mempengaruhi perilaku Politik masyarakat. seperti halnya pada kasus diatas, bahwa yang mana politik terpengaruh terhadap penampilan yang sederhana dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

➤ **Wawancara dengan S.J.Y (48thn)**

*“Pasangan pasangan Jokowi-JK mempunyai karakter yang saling menutupi antara satu dengan yang lainnya. Jokowi birokrat handal yang sudah terukur dan JK dikenal sebagai politisi tulen. yang selalu membangun kerjasama dikalangan eksekutif dan legislatif. Kolaborasi kedua karakter yang dimiliki oleh pasangan tersebut dapat menciptakan suatu *performance* yang baik serta dapat menarik perhatian masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.”*

➤ **Wawancara dengan E.G, (27thn)**

*“Letak ketertarikan saya terhadap pasangan Jokowi-JK karena di anggap cocok untuk memimpin bangsa ini, yang mana perpaduan dua karakter, yang satu keras dalam pengambilan kebijakan dan yang satu lembut dalam menyikapi segala permasalahan telah tergambarkan dalam *performance* atau penampilan.”*

Dari gambaran tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa faktor penampilan seorang kandidat khususnya pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya pada Etnis Tionghoa di Kecamatan Wenang sangat mempengaruhi perilaku Politik masyarakat.

4. Track Record Dan Pengalaman

Dalam proses pemilihan seorang calon pemimpin, salah satu aspek yang banyak menjadi bahan pertimbangan khususnya para pemilih rasional dan tidak partisipan adalah *track record* dan pengalaman seorang kandidat. Pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon yang memiliki jejak langkah karier maupun pengalaman yang dianggap mampu dan dapat diandalkan untuk menjadi seorang pemimpin pilihan rakyat. Karena itu sangatlah penting bagi seorang calon untuk dengan strategis menjual citranya (*track record* dan Pengalamannya) kepada para pemilih guna mendapatkan dukungan politik yang kuat dan besar.

Kemenangan pasangan Jokowi-JK pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari pengaruh faktor *track record* dan pengalaman dan kandidat tersebut. Jika dilihat pada konteks *track record* dan pengalaman, maka pasangan Jokowi-JK lebih unggul dari pasangan lain. Dimana kapasitas dari seorang Jokowi sebagai mantan Walikota Solo Selama 10 Tahun dan menjadi Gubernur DKI. Pengalaman birokrat yang sudah terukur, yang selalu konsisten dengan harapan dan tuntutan masyarakat yang tidak pernah cacat dihadapan publik kemudian dapat meraih suara terbanyak pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk lebih jelas dalam melihat pengaruh *track record* dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang kandidat dalam mempengaruhi perilaku Politik masyarakat tionghoa yang berada di Kecamatan Wenang.

Kondisi perilaku pemilih masyarakat etnis tionghoa di Kecamatan Wenang kebanyakan dipengaruhi oleh faktor figuritas yang dimiliki kandidat. Secara umum, bagi masyarakat etnis tionghoa di Kecamatan Wenang siap menerima siapa saja calon yang terpenting kandidat tersebut mempunyai kemampuan dan mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Inilah alasan masyarakat etnis tionghoa lebih dominan memilih pasangan Jokowi-JK karena pengalaman dan peranan yang kompeten bagi masyarakat untuk dibuat sebagai acuan berpikir dan bertindak.

➤ **Wawancara dengan I.T (34thn)**

“Alasan tidak memilih pasangan Prabowo-Hatta karena saya menilai figur prabowo, figur yang tempramental dan memiliki pengalaman dalam militer yang boleh dikatakan tidak bagus (pemecatan) sebagai prajurit militer.”

Untuk membaca dinamika perilaku politik masyarakat tionghoa yang ada di Kecamatan Wenang, dapat dicermati dari ukuran kemampuan, *track record* dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Jika dilihat pada persoalan ini, maka pasangan Jokowi-JK yang lebih unggul ketimbang pasangan Prabowo-Hatta.

Sesuai dengan temuan dilapangan dengan komunitas masyarakat tionghoa di kota Manado khususnya di Kecamatan Wenang mengungkapkan bahwa mereka sangat tertarik pada figur pasangan Jokowi-JK, yang mana pertimbangan utama mereka adalah kemampuan, *track record* dan pengalaman yang dimiliki oleh kandidat dari pasangan ini tidak diragukan lagi bila dibandingkan dengan kandidat Prabowo-Hatta. Poin penting bagi mereka adalah berdasarkan pengalaman figur kandidat tersebut mempunyai integritas yang tinggi, amanah dan dapat dipercaya.

Politik rasional akan selalu mempertanyakan eksistensi (bukan statis) dari calon kandidat. *Track record* dan pengalaman kandidat diperlukan buat pedoman untuk menentukan penilaiannya. Karena pemilih akan menetapkan pilihannya berdasarkan upayanya menelusuri *track record* dan pengalaman para calon kandidat. Pada level ini, tentu pemilih yang rasional bukan melihat dalam konteks primordialitas *track record* dan pengalaman dari calon kandidat, akan tetapi lebih fokus kepada masalah integritas, kapasitas, kapabilitas, dan prospek calon kandidat yang diharapkan mampu menjadi pemimpin yang mampu dalam segala hal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka disimpulkan:

- 1) Perilaku politik Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Manado Kecamatan Wenang dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2014, WNI keturunan tionghoa begitu mendambakan figur yang benar – benar pro akan rakyat, *track recordnya* serta pengalaman, faktor kandidat pun merupakan hal

yang diperhitungkan, performance dari kandidat juga diperhatikan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Manado Kecamatan Wenang. Selain itu Citra Joko Widodo – JK yang dekat dengan rakyat dan punya orientasi pada kerja juga menjadi pematik .

- 2) Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Wenang begitu tertarik dengan pasangan calon Presiden yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Jokowi - JK karena menurut mereka calon – calon pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu memperhatikan kaum - kaum minoritas di negeri ini, mereka tidak tertarik dengan Prabowo – Hatta, karena melihat sosok pasangan yang dinilai memiliki sifat ambisius. sementara itu figure dari Prabowo sendiri mereka menganggap masih mempunyai kontroversi isu pelanggaran HAM serta peristiwa penculikan aktivis 1997 – 1998 dan diduga terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 yang menyerang kaum Tionghoa. Sehingga ada trauma trauma Politik tersendiri dari warga Tionghoa .

Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat jelas ada trauma trauma politik warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih tertanam dihati masyarakat etnis Tionghoa. Diskriminasi serta kerusuhan di masa lalu begitu membekas dalam benak mereka. Sehingga sudah seharusnya Pemerintah memperhatikan kondisi di negeri *Bhinneka Tunggal Ika* ini,

Baru-baru ini ada kebanggaan tersendiri bagi warga etnis tionghoa, 17 agustus 2015 bertepatan peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-70 di Istana Kepresidenan, Pemerintah Indonesia telah memperkenankan seorang etnis tionghoa bagian dari Paskibraka yang membawa bendera sangsaka Merah Putih. Sejarahnya selama 69 tahun kemerdekaan Indonesia tak satupun peranakan Indonesia Tionghoa dilibatkan di Paskibraka Istana Kepresidenan, terlepas dari semua itu seorang Basuki Tjahja Purnama atau biasa di sapa Ahok yang merupakan etnis Tionghoa. Orang nomor satu DKI Jakarta ini telah menjawab keraguan diskriminasi di zaman perpolitikan sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- _____. 1983. Partisipasi dan Partai Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Efriza. 2012. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta. Bandung.
- Gaffar, Afan Gaffar. 2002. Javanese Voters: a Case Study of Elecycion under a Hegemonic Paarty System. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P., dkk. 2010. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hoon, Chang-Yau. 2012. Identitas Tionghoa Pasca-Suharto: Budaya, Politik dan Media. LP3ES. Jakarta.
- Juliastutik: Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi. HUMANITY, Volume 6, Nomor 1, September 2010
- Kristiadi, Jean. 2006. Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia. Prisma. Jakarta.
- Mahendra, Oka. 2005. Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal. Millenium Publisher. Jakarta.
- Maryanah, Tabah. 2005. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pasca Orde Baru di Bandar Lampung. UNILA.

- Nursal, Adman. 2004. Political Marketing Strategi Memenangkan Sebuah Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rahman, A. H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. Metode Penelitian. Jakarta. Pustaka Media
- Suryadinata, Leo. 2012. Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia. LP3ES. Jakarta.
- Suhardinata, Justian. 2009. WNI Keturunan Tionghoa dalam stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Syaukani, dkk. 2005. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cetakan ke-6. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Undang-Undang:

- Undang-Undang dasar 1945 dan Amandemen dilengkapi Profile Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD.
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ditetapkannya Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional
- Ramlan Surbakti. Partai, Pemilu dan Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.hal 170
- Sumber lain : KPU Manado Rekapitulasi Data, DAI*